

Efektivitas Transformasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Singkawang: Dari Bantuan Sosial ke Pemberdayaan Ekonomi

Terry Listiyadi¹

¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), e-mail: listiyaditerry@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
10-01-2026

Direvisi:
29-01-2026

Diterima:
31-01-2026

ABSTRACT

Poverty in Singkawang City remains a strategic issue despite showing a macro downward trend to 4.53% in 2024. The main challenges lie in the extreme disparity of poverty distribution across regions, the high Open Unemployment Rate (7.92%) dominated by vocational graduates, and low access to basic infrastructure such as decent drinking water. This research aims to formulate a targeted and inclusive poverty reduction system in Singkawang City for the 2025-2029 period. The main focus includes identifying poverty characteristics at the micro level, determining priority intervention areas, and formulating integrative strategies that combine social protection with sustainable economic empowerment. This study uses a qualitative descriptive analysis approach and micro-data-based spatial analysis. Data are sourced from Statistics Indonesia (BPS) and the National Socio-Economic Single Data (DTSEN) to map poverty pockets on a by name by address basis. Composite analysis is used to establish intervention priorities in six main areas: individual, employment, health, uninhabitable housing infrastructure, water/waste infrastructure, and social. Findings show that poverty in Singkawang is dominated by structural factors, with Pasiran, Sedau, Roban, and Maya Sopa sub-districts identified as the main priority areas for intervention. The recommended reduction strategy shifts from mere social assistance (bansos) toward strengthening MSMEs, vocational training, and cross-sector data synchronization through the optimization of the TKPKD's role. The implementation of region-based policies and micro-data is projected to be able to reduce the poverty rate to a target of 3.70% by 2030 and eliminate extreme poverty sustainably.

Keywords : Poverty, Economic Empowerment, Public Policy, Singkawang City

ABSTRAK

Kemiskinan di Kota Singkawang masih menjadi isu strategis meskipun secara makro menunjukkan tren penurunan menjadi 4,53% pada tahun 2024. Tantangan utama terletak pada ketimpangan sebaran kemiskinan antarwilayah yang ekstrem, tingginya Angka Pengangguran Terbuka (7,92%) yang didominasi lulusan vokasi, serta rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar seperti air minum layak. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sistem penanggulangan kemiskinan yang terarah dan inklusif di Kota Singkawang untuk periode 2025-2029. Fokus utama mencakup identifikasi karakteristik kemiskinan di tingkat mikro, penentuan wilayah prioritas intervensi, serta perumusan strategi integratif yang menggabungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dan analisis spasial berbasis data mikro. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan kantong kemiskinan secara by name by address. Analisis komposit digunakan untuk menetapkan prioritas intervensi pada enam bidang utama: individu, ketenagakerjaan, kesehatan, infrastruktur RTLH, infrastruktur air/limbah, dan sosial. Temuan menunjukkan bahwa kemiskinan di Singkawang didominasi oleh faktor struktural, dengan Kelurahan Pasiran, Sedau, Roban, dan Maya Sopa diidentifikasi sebagai wilayah prioritas utama intervensi. Strategi penanggulangan yang direkomendasikan bergeser dari sekadar bantuan sosial (bansos) menuju penguatan UMKM, pelatihan vokasi, dan sinkronisasi data lintas sektor melalui optimalisasi peran TKPKD. Implementasi kebijakan berbasis wilayah dan data mikro diproyeksikan mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga target 3,70% pada tahun 2030 serta menghapus kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

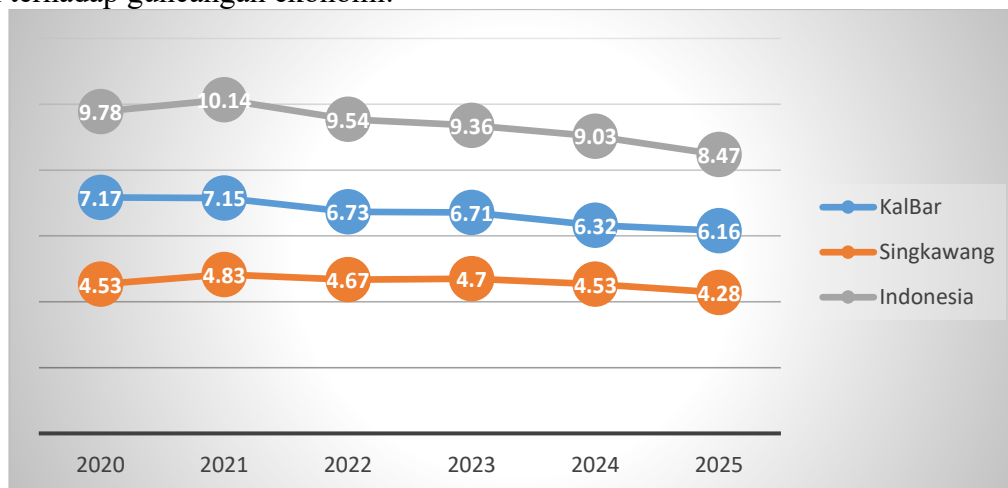
Kata Kunci : Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi, Kebijakan Publik, Kota Singkawang.

Corresponding Author : Terry Listiyadi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Jl. Pelita, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat, e-mail: listiyaditerry@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu strategis pembangunan yang bersifat multidimensi dan menjadi perhatian utama baik di tingkat global maupun nasional (Hartono & Anwar, 2018; Marsitadewi & Sudemen, 2024). Dalam Agenda Sustainable Development Goals (SDGs), pengentasan kemiskinan ditempatkan sebagai tujuan pertama, yang menegaskan bahwa kemiskinan bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan layak, serta partisipasi sosial (UNDP, 2025; WTO, 2023). Di tingkat nasional, komitmen tersebut diterjemahkan melalui RPJMN 2025–2029 yang menargetkan penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga kisaran 4,5–5,0 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2029 (Indonesia, 2025b). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang menjadi prioritas global dan nasional, sehingga pengentasannya menuntut pendekatan holistik mencakup aspek ekonomi, sosial, dan pembangunan manusia.

Kota Singkawang, sebagai salah satu kota di Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan capaian yang relatif baik dalam pengendalian kemiskinan. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan Kota Singkawang tercatat sebesar 4,53 persen atau sekitar 10.820 jiwa, dan diproyeksikan menurun menjadi 4,28 persen pada tahun 2025 (Singkawang, 2025). Meskipun berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, tantangan kemiskinan di Kota Singkawang masih nyata, terutama terkait dengan sebaran kemiskinan yang tidak merata, keberadaan kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertentu, serta kerentanan kelompok masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi.



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2025 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Kajian terdahulu mengenai efektivitas transformasi kebijakan penanggulangan kemiskinan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif berbasis bantuan sosial menuju pendekatan pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Model bantuan sosial cenderung menciptakan ketergantungan dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi masyarakat miskin (Purba et al., 2025; Zega et al., 2025). Sebaliknya, pendekatan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan lokal terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi (Firmansyah et al., 2025; Setyawan et al., 2025). Di tingkat daerah, penelitian oleh Prasetyo (2023) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi kebijakan sangat ditentukan oleh sinergi antarinstansi, validitas data penerima manfaat, serta partisipasi aktif

masyarakat (Budijaya & Situmeang, 2025; Rumakat, 2025). Dengan demikian, efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Singkawang perlu dikaji dalam konteks sejauh mana transformasi dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi mampu menciptakan kemandirian dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Singkawang dalam kerangka Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029. Fokus kajian diarahkan pada integrasi perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi serta penguatan infrastruktur dasar. Melalui analisis berbasis data mikro dan pendekatan wilayah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang inklusif untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di Kota Singkawang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam substansi, arah kebijakan, serta strategi yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Singkawang 2025–2029. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran makna, konteks, dan hubungan antarvariabel kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat daerah. Data utama penelitian diperoleh melalui studi dokumenter terhadap dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD Kota Singkawang 2025–2029, Inpres No. 8 Tahun 2025, dan RPJMN 2025–2029, serta berbagai laporan statistik dan publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Data sekunder meliputi hasil kajian akademik, laporan kebijakan, dan berita daring yang relevan untuk memperkuat validitas analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-analitis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi fokus kebijakan, arah strategis, serta konsistensi antara dokumen RPKD dan kebijakan nasional. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi kebijakan guna menilai keselarasan antara strategi penanggulangan kemiskinan daerah dengan prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, digunakan pula analisis spasial deskriptif terhadap sebaran kemiskinan per kelurahan dengan memanfaatkan data BPS untuk menilai efektivitas penentuan wilayah prioritas intervensi. Dengan kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai model kebijakan penanggulangan kemiskinan yang adaptif, berbasis data, dan sesuai dengan konteks sosial-ekonomi Kota Singkawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Kemiskinan dan Arah Strategi Penanggulangan di Kota Singkawang 2025–2029

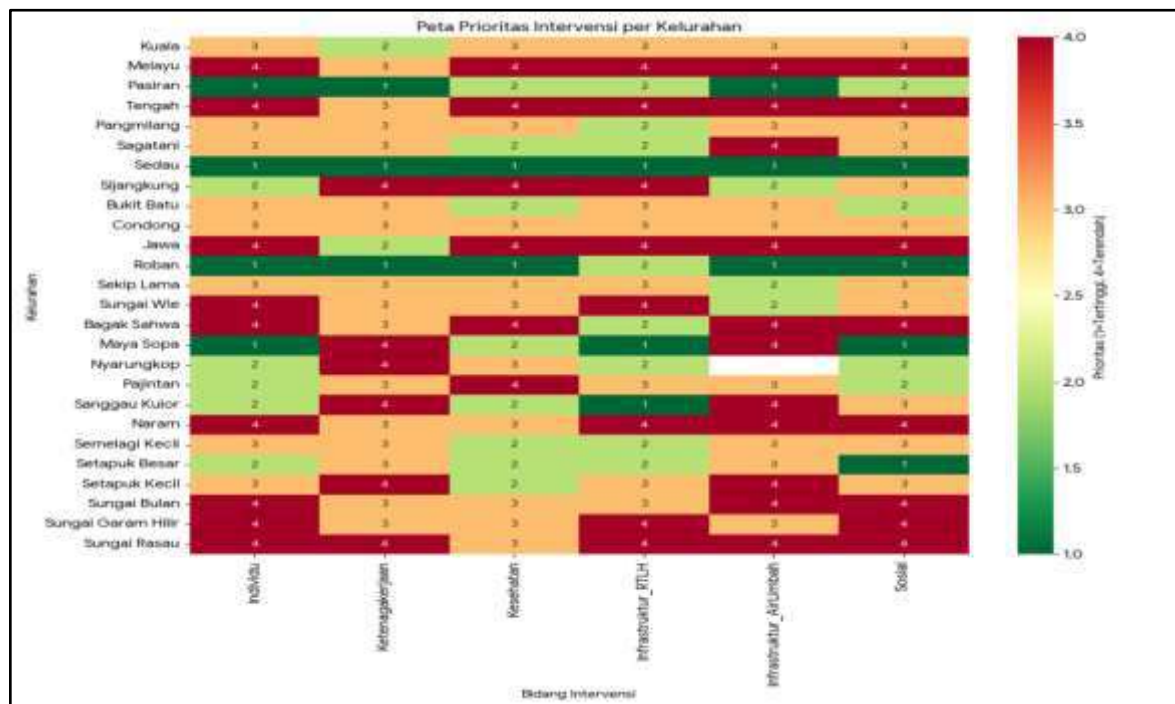
Analisis RPKD Kota Singkawang 2025–2029 menunjukkan bahwa kemiskinan di daerah ini lebih didominasi oleh faktor struktural dibandingkan kemiskinan absolut. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka mencerminkan ketidaksesuaian antara ketersediaan lapangan kerja dengan kompetensi tenaga kerja. Hal ini berimplikasi langsung pada rendahnya pendapatan rumah tangga dan tingginya ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Adapun kondisi kemiskinan di Kota Singkawang yang diidentifikasi, di antaranya:

1. Secara makro, angka kemiskinan di Kota Singkawang menunjukkan tren positif dengan adanya penurunan. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 10.820

jiwa (4,53%) dan diproyeksikan terus menurun hingga 4,28% pada tahun 2025. Indeks keparahan kemiskinan juga membaik, yang berarti kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil. Namun, tantangan utama tetap ada pada kelompok "Desil 1" (masyarakat paling bawah), yang jumlahnya masih mencapai 13.560 jiwa dengan konsentrasi tertinggi di Singkawang Timur dan Singkawang Tengah.

2. Kemiskinan di Singkawang disebabkan oleh beberapa faktor krusial:
 - a. Bidang Ketenagakerjaan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Singkawang mencapai pada tahun 2025 mencapai 7,92%, yang merupakan tertinggi kedua di Kalimantan Barat. Masalah ini didominasi oleh lulusan SMK/MA Kejuruan yang belum terserap pasar kerja secara optimal.
 - b. Pendidikan, yaitu terdapat penurunan drastis pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 16-18 tahun, dengan rata-rata pertumbuhan Tahun 2020-2024 hanya mencapai 2,43% yang menandakan risiko putus sekolah setelah jenjang SMP.
 - c. Infrastruktur Dasar, akses terhadap air minum layak masih menjadi kendala besar karena Singkawang secara konsisten berada di bawah rata-rata provinsi dengan tren yang cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 59,72%, menjadi 51,10% di tahun 2024.
3. Kemiskinan di Singkawang bersifat sangat terlokalisasi dengan disparitas atau perbedaan yang ekstrem antar kelurahan. Sebagai contoh, di Singkawang Barat, Kelurahan Pasiran memiliki jumlah penduduk miskin yang sangat tinggi (1.071 jiwa), sedangkan Kelurahan Tengah hanya memiliki 59 jiwa. Oleh karena itu, intervensi pemerintah tidak bisa dipukul rata, melainkan harus difokuskan secara mikro pada titik-titik krisis seperti Sedau, Roban, dan Maya Sopa.
- 4.



Gambar 2. Komposit Prioritas Wilayah Penanggulangan Kemiskinan

5. Untuk mencapai target 2025-2029, pemerintah daerah Kota Singkawang mengalihkan fokus dari sekadar memberikan bantuan sosial (bansos) jangka pendek menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi utama meliputi:

- a. Sinkronisasi Data: Memperbaiki validasi data kemiskinan agar program pemerintah tepat sasaran (mencegah salah sasaran bantuan).
- b. Kolaborasi Lintas Sektor: Mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk mengintegrasikan program antar Dinas (OPD) agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
- c. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar: Memprioritaskan investasi pada kesehatan, pendidikan, dan air bersih sebagai fondasi agar masyarakat bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Adapun beberapa kebijakan strategi penanggulangan Kemiskinan di Kota Singkawang diantaranya (Indonesia, 2025a, 2025b; Pemerintah Kota Singkawang, 2025):

Tabel 1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Fokus Kebijakan	RPJMN 2025-2029	Inpres No. 8 Tahun 2025	RPJMD/RKPD Kota Singkawang 2025-2029
Tujuan Utama	Menurunkan Tingkat Kemiskinan Nasional (4,5–5,0%) dan Ekstrem (<0,5% pada 2026)	Optimalisasi pelaksanaan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Menurunkan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial (Target hingga 3,70% pada 2030)
Perlindungan Sosial (Mengurangi Beban)	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan (melalui Kartu Kesejahteraan)	Strategi kebijakan Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program Makan Gratis untuk Siswa Sekolah; Program UHC
Pemberdayaan Ekonomi (Meningkatkan Pendapatan)	Peningkatan pendapatan masyarakat (melalui Kartu Usaha dan kesempatan kerja)	Strategi kebijakan Peningkatan pendapatan masyarakat	Program Pengembangan UMKM dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif; Pelatihan keterampilan kerja berbasis potensi lokal
Infrastruktur & Hunian	Penguatan layanan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi layak, dll.)	Strategi kebijakan Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Rehabilitasi Rutilahu); Pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi
Mekanisme Target	Menggunakan data tunggal sosial ekonomi (Regsosek) yang dimutakhirkan	Memastikan ketepatan sasaran dan pemutakhiran data penerima <i>by name by address</i>	Pemetaan dan pemutakhiran data kemiskinan terintegrasi berbasis <i>by name by address</i>

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2025

B. Alternatif Pilihan Kebijakan

Terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam penanggulangan kemiskinan periode 2025–2029.

1. Alternatif pertama adalah mempertahankan pendekatan program perlindungan sosial sebagai instrumen utama pengurangan kemiskinan. Pendekatan ini relatif cepat dalam

menjaga daya beli masyarakat miskin, terutama dalam menghadapi inflasi dan guncangan ekonomi. Namun, ketergantungan yang tinggi pada bantuan sosial berpotensi menciptakan budaya ketergantungan dan kurang mendorong kemandirian ekonomi.

2. Alternatif kedua adalah mengombinasikan perlindungan sosial dengan penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pendekatan ini menempatkan bantuan sosial sebagai jaring pengaman, sementara pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja lokal menjadi strategi utama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin.
3. Alternatif ketiga adalah mengadopsi pendekatan penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah dan data mikro. Melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), intervensi dapat difokuskan pada kelurahan dan kelompok masyarakat dengan konsentrasi kemiskinan tertinggi. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan yang lebih presisi, efektif, dan berkeadilan, namun memerlukan kapasitas kelembagaan dan sistem data yang kuat.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Singkawang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi agar mampu menjawab kompleksitas penyebab kemiskinan yang bersifat multidimensi. Pemerintah daerah perlu mengombinasikan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan intervensi berbasis data mikro sebagai satu kesatuan strategi kebijakan. Pendekatan ini bukan hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga pada penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah strategis untuk memperkuat basis data dan memastikan ketepatan sasaran program, sehingga kebijakan yang dirumuskan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan serta menghindari tumpang tindih antarprogram.

Selain penguatan data, perubahan orientasi kebijakan dari dominasi bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi menjadi krusial dalam mewujudkan kemandirian masyarakat miskin. Bantuan sosial jangka pendek memang mampu menjaga daya beli masyarakat, tetapi tidak cukup untuk mengatasi akar struktural kemiskinan. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UMKM, pelatihan vokasi, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah perlu menjadi prioritas utama. Program-program tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.

Selanjutnya, koordinasi lintas sektor harus diperkuat melalui optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai penggerak utama sinergi antarorganisasi perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Kolaborasi multipihak, termasuk melalui kemitraan dengan perguruan tinggi dan pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), akan memperluas jangkauan intervensi dan mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan. Di samping itu, penerapan pendekatan berbasis wilayah hingga tingkat kelurahan memungkinkan kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap karakteristik sosial-ekonomi setempat. Jika strategi terpadu ini dijalankan secara konsisten, maka penanggulangan kemiskinan di Kota Singkawang tidak hanya menurunkan tingkat kemiskinan secara kuantitatif, tetapi juga mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Singkawang 2025–2029 merupakan instrumen strategis yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai agenda pembangunan prioritas berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Melalui kombinasi antara perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pendekatan berbasis wilayah, kebijakan ini diarahkan untuk menjawab akar struktural kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat miskin. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada keakuratan data kemiskinan, efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta konsistensi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPKD Kota Singkawang diharapkan tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga mendorong transformasi sosial ekonomi menuju masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budijaya, M. I., & Situmeang, M. (2025). Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi di Era Society 5.0. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 5(2), 1–13. <https://dx.doi.org/10.58939/afosj-las.v5i2.787>
- Firmansyah, T., Akbar, R. F., Mabsutoh, M., Dewi, M. P., & Mufidayati, K. (2025). The Role Of Community Empowerment Programs In Poverty Alleviation As A Stimulus For Economic Growth In The Parigi Baru Village Of South Tangerang City. *Res Publica : Journal of Social Policy Issues*, 4(2), 64–73.
- Hartono, N., & Anwar, M. (2018). Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Spiritual Para Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), Article 03. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.324>
- Indonesia, P. P. (2025a). *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/316745/inpres-no-8-tahun-2025>
- Indonesia, P. P. (2025b). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
- Marsitadewi, K. E., & Sudemen, I. W. (2024). Kemiskinan Struktural di Karangasem: Menganalisis Penyebab dan Intervensi Pemerintah. *Jurnal Good Governance*, 19–32. <https://doi.org/10.32834/gg.v20i1.745>
- Pemerintah Kota Singkawang. (2025). *RPJMD Kota Singkawang 2025-2029*.
- Purba, G. F. B., Sinulingga, D. M. C., Togatorop, J., & Harahap, L. M. (2025). Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan: Evaluasi Dari Berbagai Penelitian | Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 4(1), 108–117.
- Rumakat, L. Q. M. (2025). Analisis Efektivitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Sistem Administrasi Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 4282–4289. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1193>
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., Santoso, M. H., Syahril, & Kalalo, R. R. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>

- Singkawang, B. P. S. K. (2025). *Kota Singkawang Dalam Angka 2025*. <https://singkawangkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/a731b0beff95fb939678d89d/kota-singkawang-dalam-angka-2025.html>
- UNDP. (2025). *Sustainable Development Goals*. UNDP. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- WTO. (2023). *World Trade Report 2023—Re-globalization for a secure, inclusive and sustainable future*. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr23_e.htm
- Zega, R. I., Harefa, Y., Lase, A., & Laoli, B. (2025). Analisis Program Bantuan Sosial Pemerintah Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Desa Tetehosi Afia Mazingo. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 167–180. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.11165>